



Seminar Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Untuk Menentukan Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur

Rosdiyati¹, Indah Kurniyawati², Lilik Nur Anikah³

Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Lamongan

Email: roeshanif@unisla.ac.id, indah.kurnia5@gmail.com, liliknuraniqah@gmail.com

Abstrak

Seminar ini bertujuan untuk mengetahui apakah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Seminar ini bertujuan untuk mempelajari pajak daerah dan retribusi daerah, serta menguji pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan, seminar ini pemerintahan kabupaten/kota di Jawa Timur. Akhirnya dapat disimpulkan bahwa secara simultan baik Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Dimana variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai kontribusi sebesar 77,3% terhadap variabel Kemandirian Keuangan Daerah, sedangkan sisanya sebesar 22,7% disumbangkan oleh variabel lain yang tidak diamati dalam penelitian ini.

Kata Kunci : Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah

1. Pendahuluan

Banyaknya daerah di Indonesia membuat pemerintah pusat sulit mengkoordinasi pemerintahan yang ada di daerah-daerah sehingga untuk memudahkan pelayanan dan penataan pemerintahan, maka pemerintah pusat mengubah kebijakan yang sebelumnya berbasis sentralisasi menjadi desentralisasi. Wujud dari kebijakan desentralisasi tersebut adalah lahirnya otonomi daerah. Pertimbangan mendasar terselenggaranya otonomi daerah adalah perkembangan kondisi di dalam negeri yang mengindikasikan bahwa rakyat menghendaki keterbukaan dan kemandirian.

Kemandirian daerah dalam berotonomi daerah dapat diketahui melalui seberapa besar kemampuan sumber daya keuangan daerah tersebut agar mampu membangun daerahnya. Pendapatan asli daerah yang antara lain berupa pajak daerah dan retribusi daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber penerimaan pemerintah daerah dalam peningkatan kemandirian keuangan daerah. Sumber – sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang memang telah sejak lama menjadi unsur pendapatan asli daerah yang utama. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Sunarto dan Sunyoto (2016) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempengaruhi Kemandirian daerah dan juga dapat mempengaruhi Pertumbuhan ekonomi daerah. Pajak dan Retribusi Daerah yang tinggi berarti jumlah uang yang masuk ke kas daerah semakin banyak, sehingga pemerintah daerah berupaya untuk memajukan perekonomian daerahnya. Daerah dengan tingkat kemandirian yang tinggi berarti kabupaten/kota tersebut mampu memenuhi kebutuhannya tanpa melibatkan pihak luar, dalam hal ini adalah pemerintah pusat. Campur tangan pemerintah pusat lebih kecil jika kemandirian daerah tersebut tinggi. Namun sebaliknya, jika kemandirian kecil campur tangan pemerintah pusat semakin besar. Daerah yang mandiri berarti laju perekonomian meningkat, hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi daerah juga mengalami peningkatan.

Sesuai asas *money follows function* penyerahan kewenangan daerah juga dibarengi dengan penyerahan sumber-sumber pembiayaan yang sebelumnya masih dipegang oleh Pemerintah Pusat di era Orde Baru. Dengan demikian daerah menjadi mampu untuk





melaksanakan segala urusannya sendiri sebab sumber-sumber pembiayaan juga sudah diserahkan. Jika mekanisme tersebut sudah terwujud maka cita-cita kemandirian daerah dapat direalisasikan (Haryanto, 2014:7).

Nggilu, et al. (2016) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah untuk menetapkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Sumber – sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal. Namun tentu saja di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di antaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang memang telah sejak lama menjadi unsur pendapatan asli daerah yang utama.

Haerunnisa (2018) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diharapkan mampu mengurangi ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat karena pada prinsipnya, semakin besar sumbangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kepada APBD akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat yang bisa menjadi tolak ukur kemandirian keuangan daerahnya.

Provinsi Jawa Timur secara geografis terletak diantara 111⁰ Bujur Timur – 114⁰ Bujur Timur dan 7⁰ 12 Lintang Selatan - 8⁰48 Lintang Selatan, dengan luas wilayah sebesar 47.963 km². Secara administratif Provinsi Jawa Timur terbagi menjadi 29 kabupaten dan 9 kota, dengan Kota Surabaya sebagai ibukota provinsi. Provinsi Jawa Timur memiliki beberapa potensi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat dijadikan sebagai penerimaan Pendapatan Daerah, yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan meningkatkan pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diharapkan mampu mengurangi ketergantungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Pemerintah Pusat karena pada prinsipnya, semakin besar sumbangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kepada APBD akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat yang bisa menjadi tolak ukur kemandirian keuangan daerahnya.

2. Metode

Metode yang digunakan untuk merealisasikan program pengabdian masyarakat ini adalah dengan memberikan seminar pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah pada pemerintah kabupaten/ kota di provinsi jawa timur. Sebagai awalan program dilakukan tahap persiapan kegiatan yang termasuk perancangan pelaksanaan kegiatan meliputi tahapan survei tempat, pelaksanaan program, monitoring dan evaluasi program.

Dalam tahap persiapan dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur, untuk meminta ijin sosialisasi dan tempat untuk melakukan seminar pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah pada pemerintah kabupaten/kota di provinsi jawa timur. Survei tempat dilakukan dengan mendatangi instansi di Jawa Timur untuk meninjau keadaan dan mengadakan wawancara dengan pemerintahan guna memperoleh data- data yang diperlukan dalam pelaksanaan program. Tahapan ini digunakan guna mencermati permasalahan yang ada di lapangan, untuk mencari tahu bagaimana pengetahuan peserta seputar pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah pada pemerintah kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur.

Pelaksanaan program merupakan realisasi perencanaan program, yaitu dengan memberikan seminar pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah pada pemerintah kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur. Pemantauan hasil dan evaluasi praktek dilaksanakan guna mengetahui keberhasilan program. Evaluasi dilakukan dengan melihat langsung hasil pelatihan oleh penerima manfaat program. Jika tingkat keberhasilan masih jauh dari apa yang diharapkan maka akan diberikan perhatian lebih untuk seminar pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan. Diharapkan program ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas SDM para pegawai pemerintahan, sehingga dapat menjadi bekal pegawai untuk meningkatkan kemampuan pegawai dalam menerapkan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah pada pemerintah kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur.





3. Hasil Dan Pembahasan

Hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan seminar pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah pada pemerintah kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur ini. Berdasarkan wawancara dan pengamatan langsung selama kegiatan berlangsung, memberikan hasil sebagaiberikut:

- a. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman pegawai terhadap penggunaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan yang dapat digunakan oleh pegawai dalam membuat alisis secara mandiri (tidak bergantung pada pihak lain).
- b. Kemampuan pegawai dalam penggunaan/membuat pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan. Secara mandiri dantidak bergantung pada fungsilain dalam perusahaan.

Kegiatan seminar dan pendampingan ini dilakukan dengan melibatkan dua orang dosen yang bermitra dengan pemerintahan di Jawa Timur. Tim pengabdian dipilih berdasarkan bidang keahlian yang dimiliki sehingga dapat menunjang kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM).

Sesuai dengan permintaan mitra,dimana pimpinan pemerintahan kabupaten/kota menginginkan seluruh pegawainya bekerja dengan profesional,maka seminar ini melibatkan pegawai di intansi tersebut.

Teknis pelaksanaan dilakukan dengan metode seminar langsung. Pelaksanaan kegiatan pengabdian berlangsung pada selama 2 hari mulai dari pukul 09.00 s/d 12.30 WIB dengan dihadiri oleh seluruh pegawai pemerintahan kabupaten/kota yang ada diJawa Timur. Ruang rapat kantor bupati dipilih sebagai tempat pelaksanaan kegiatan dengan pertimbangan sarana dan prasarana yang cukup memadai.

4. Simpulan dan Rekomendasi

Dari hasil kegiatan yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa :

- a. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman pegawai terhadap penggunaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan yang dapat digunakan oleh pegawai dalam membuat alisis secara mandiri (tidak bergantung pada pihak lain).
- b. Kemampuan pegawai dalam penggunaan/membuat pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan. Secara mandiri dantidak bergantung pada fungsi lain dalam perusahaan.

Saran guna perbaikan kegiatan berikutnya ialah dengan menambah peserta yakni pegawai terutama pada pegawai yang baru masuk perusahaan agar ilmu yang diberikan lebih bermanfaat.

5. Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur 2019, www.jatim.bps.go.id.

Darize, Nurlan. 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi 2. PT Indeks. Jakarta.

Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.

Haerunnisa. (2018) "Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Kota Makassar". *Jurnal Akuntansi*. 4 (2), hlm 44-55.

Halim, Abdul, 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Revisi, Penerbit Salemba Empat.

Halim dan Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik : teori, konsep dan aplikasi*. Edisi ke 4. Salemba Empat. Jakarta.

Halim dan Kusufi. 2013. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Salemba Empat. Jakarta.

Haryanto. 2014. "Kemandirian Daerah Sebuah Perspektif dengan metode Path Analysis". *Jurnal ekonomi dan Kewirausahaan*. Vol 9.

Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*. ANDI. Yogyakarta.





- Nggilu, F., Sabijono, H., & Tiyaroh, V. (2016). "Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo". *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. 16 (4), hlm 623-635.
- Novalistia, L. R. (2016) "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dan Bagi Hasil Pajak terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Tengah". *Jurnal Akuntansi*. 2 (2), hlm 11-35.
- Saprudin. (2018) "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah terhadap Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo". *Jurnal Akuntansi*. 1 (1) hlm 47-58.
- Saragih, Juli Panglima, 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sunarto & Sunyoto, T. (2016) "Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Daerah yang berdampak pada Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten Dan kota di Jawa Tengah)". *Dharma Ekonomi*. 13 (43) hlm 13-22.
- Susianti, D., Murhabban., & Zulkarnaini. (2017). "Pengaruh Kontribusi Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Daerah". *Jurnal Akuntansi Dan Pembangunan*. 3 (1), hlm 15-28.
- Siahan, Marihot. P. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Edisi Revisi. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Bandung.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Administrasi dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 10. Salemba Empat. Jakarta.

